

PENGEMBANGAN MODEL PERENCANAAN KOMUNIKASI ANTAR ETNIK SEBAGAI SOLUSI ATAS MENGUATNYA KESADARAN ETNOSENTRISME



(Studi Komunikasi Antaretnis Kaili-Bugis Di Kota Palu)

Oleh: Abd. Kadir Patta

ABSTRAK

Penelitian ini secara spesifik menganalisis tentang fenomena menguatnya kesadaran etnosentrisme di kalangan komunitas etnis (Bugis dan Kaili) di Kota Palu dengan menawarkan model solusi alternatif melalui perspektif komunikasi antaretnis. Kajian ini mencoba mengungkap beberapa hal yang dipandang penting diantaranya; (1) gambaran luas tentang dinamika hubungan antaretnis Bugis – Kaili di masa lalu hingga masa kini; (2) faktor – faktor pemicu menguatnya semangat etnosentrisme yang pada titik klimaksnya menjelma dalam bentuk konflik sosial antaetnis. Kajian ilmiah dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: (1) melakukan observasi lapangan yaitu pengamatan langsung tentang dinamika hubungan antaretnis Bugi – Kaili di lokasi penelitian; (2) melakukan pertemuan dalam bentuk Focused Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak terkait dengan melibatkan unsur-unsur; masyarakat dari etnis Bugis dan Kaili, Camat Palu Barat, Lurah se- Kecamatan Palu Barat, Danramil, Kapolsek Palu Barat serta Pemuda Bugis dan Kaili; (3) melakukan wawancara mendalam atas beberapa isu yang memerlukan pendalaman informasi kepada beberapa tokoh masyarakat etnis Bugis dan Kaili. Ketiga tahapan tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap kompleksitas problem hubungan antaretnis Bugis dan Kaili secara dalam dan komprehensif.

Keyword: *Pengembangan Model, Komunikasi, Etnosentrisme*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman etnik, suku, bahasa, nilai budaya, dan lainnya. Pada satu sisi keanekaragaman menjadi khazanah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Namun seringkali menjadi faktor disparitas yang potensial menimbulkan disintegrasi sosial. Berbagai fenomena konflik yang mengarah pada kerusuhan pernah terjadi di beberapa daerah diantaranya; kerusuhan SARA di NTT (1995), kerusuhan di Cikampek (1996), kerusuhan Situbondo (1996), kerusuhan di Tasikmalaya (1996), kerusuhan Sangga Ledo (1996), kerusuhan di Pontianak (1997), kerusuhan di Rengasdengklok (1997), kerusuhan di Cingkarang (1997), kerusuhan Poso (1998) kerusuhan Ambon (1999), Kerusuhan di Kalimantan Tengah (2001).

Tidak kurang 5 kali terjadi konflik antaretnis Kaili dan Etnik Bugis di Kota Palu. Peristiwa konflik sosial pada bulan Agustus tahun 2006 tergolong besar karena melibatkan warga masyarakat dari kedua etnik (Kaili dan Bugis) dalam skala yang luas. Ketakutan, kecemasan bahkan sebahagian besar warga etnik Bugis di sekitar tempat kejadian peristiwa (di Pasar Inpres Kota Palu) terpaksa harus mengungsikan diri ke tempat lain untuk menghindari kemungkinan menjadi korban. Sementara pada bulan Juli tahun 2009

meskipun eskalasi konfliknya lebih kecil namun nyaris saja peristiwa tersebut terulang kembali seperti peristiwa 3 tahun lalu.

Untuk melakukan penelusuran ilmiah tentang solusi alternative terhadap fenomena disparitas social, maka rencana penelitian ini secara sistematis berfokus pada tiga aspek utama yakni :

1. Bagaimana dinamika hubungan antaretnis Kaili-Bugis di Kota Palu ditinjau dari aspek historisitasnya ?
2. Bagaimana gejala pemikiran etnosentrisme di kalangan masyarakat etnis Bugis dan etnis Kaili dan faktor-faktor apa yang menyebabkan menguatnya semangat etnosentrisme di kalangan etnis Bugis dan etnis Kali di Kota Palu ?
3. Bagaimana mengembangkan model perencanaan komunikasi antaretnik untuk mencegah semangat etnosentrisme menjadi potensi konflik sosial ?

METODE PENELITIAN

Pengamatan Terlibat (participant observation)

Metode ini digunakan dalam melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena komunikasi antaretnik dengan fokus utama pada hubungan kelompok etnis Kaili dan Bugis; pola dan intensitas komunikasi, bahasa yang digunakan sehari-hari, hubungan ekonomi, pola pemukiman, kelompok paguyuban dan perilaku hidup sehari-hari. Data yang diperoleh melalui metode ini dijadikan sebagai bahan diskusi dalam metode FGD yang akan diterapkan.

Wawancara Individual (individual interview)

Metode ini dilakukan melalui *indept interview* atau wawancara mendalam bertipe *open-ended*, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan kuesioner. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk mengumpulkan data-data berupa: (a) sejarah dinamika hubungan komunikasi antaretnik Kaili dan Bugis di Kota Palu; (b) Tingkat adaptasi etnis Bugis dalam interaksi sosial; (c) respon dan tingkat penerimaan etnis Kaili terhadap keberadaan etnis Bugis di Kota Palu. (3) Sebab dan kronologis munculnya konflik sosial di masa lalu. (4) bentuk solusi yang telah dilakukan dalam menyelesaikan konflik, (5) kelemahan-kelemahan pendekatan solusi di masa lalu (6) solusi alternatif yang diharapkan oleh kedua etnis (Kaili dan Bugis).

Diskusi kelompok terfokus (focused group discussion)

Metode ini digunakan untuk mengungkap kompleksitas permasalahan yang akan dikaji. Melalui FGD akan tercipta diskursus dimana permasalahan yang sedang dibahas dapat ditinjau dari berbagai perspektif sekaligus tercipta saling *cross chek* antar peserta yang terlibat dalam FGD. Penggunaan FGD mengacu pada Bugin (2003) di antaranya: (a) penetapan tujuan, di mana tujuan tersebut harus diketahui oleh peserta FGD melalui pemberitahuan sebelum dilaksanakan FGD, meliputi topik-topik penting yang akan diangkat, tujuan-tujuan umum FGD, serta peserta yang akan dilibatkan; (b) FGD tidak bisa dilepas dari interview pribadi (*individual interviewing*), artinya pada proses pelaksanaan FGD, proses *interview* pribadi menjadi teknik-teknik penting yang digunakan

untuk mengungkapkan persoalan sebenarnya; (c) hasil FGD akan lebih bermakna, apabila penggunaannya dikombinasikan dengan metode observasi partisipasi. Mengkombinasikan kedua metode ini bermanfaat untuk mengulas fokus masalah secara lebih efisien.

Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan FGD, akan dianalisis secara kualitatif. Semua data yang berhasil dikumpulkan disusun secara sistematis berdasarkan topik dan konten yang dikemukakan oleh informan. Paling tidak ada tiga tahapan analisis data yakni:

- a. Data yang diperoleh melalui observasi akan dianalisis secara reflektif atas seluruh pengamatan yang dan kesaksian langsung berupa; penglihatan, pendengaran dan merasakan suasana interaksi sosial yang sedang berlangsung pada saat melakukan observasi lapangan.
- b. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan akan dianalisis secara terstruktur yaitu: (1) *editing data*, berkaitan dengan penyusunan kembali data rekaman wawancara dalam bentuk tulisan; (2) pengkategorian data yaitu pengelompokan data berdasarkan rumusan masalah penelitian. (3) interpretasi dan pemaknaan data, yaitu suatu proses penafsiran secara sungguh-sungguh terhadap makna di balik informasi yang disampaikan oleh indorman
- c. Analisis integratif antar data observasi, wawancara informan, FGD dan teori atau konsep. Untuk memperoleh gambaran data yang sinkron dan lengkap, peneliti akan menggabungkan ide-ide dasar dan *cross-check* antar data.

Analisis Sejarah (historical analysis)

Berangkat dari analisis sejarah diharapkan dapat terungkap sejumlah variabel sosial yang mengalami perubahan selama dalam beberapa dasawarsa berupa; kondisi demografis, keadaan ekonomi, transformasi nilai budaya, pranata sosial dan sebagainya. Perubahan yang terjadi pada variabel sosial tersebut berimplikasi pada perubahan konstelasi hubungan antar kedua etnis tersebut.

Analisis Penilaian Subjektif

Analisis penilaian subjektif dimaksudkan untuk mengetahui perspektif emik informan dalam menilai kompleksitas gagasan yang muncul melalui wawancara dan proses diskursus melalui FGD. Setiap informan akan memberikan mengungkap pengetahuan, pengalaman dan persepsi subyektif mereka terhadap berbagai persoalan sosial yang melingkupi hubungan komunikasi antaretnis Kaili-Bugis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Terbentuknya Pasar Inpres Manonda Palu

Seiring perkembangan zaman dan pertambahan jumlah penduduk, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat telah mendorong perubahan pengelolaan pasar. Suatu sistem pengelolaan baru yang ditandai dengan kebijakan pasar yang bersifat menetap pada suatu

lokasi tertentu. Dalam perkembangannya pasar yang telah menetap tersebut (sekarang Pasar Tua Bambaru) mengalami perluasan (sekarang pertokoan) terus berlangsung sampai penjajahan Jepang hingga zaman kemerdekaan.

Ketika itu wilayah Propinsi Sulawesi Tengah masih dalam status Keresidenan. Status dan pengaturan pasar yang mulanya dikuasai oleh penjajah tersebut kini diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Mengacu pada Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok - pokok pemerintahan di daerah, dan seiring dengan hak pemberian ekonomi kepada wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, maka pasar diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat I Sulawesi Tengah yang pengelolanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah Tingkat II Donggala.

Penerapan hak otonomi dan perangkat peraturan pokok-pokok pemerintah daerah sebagai dasar operasional pembangunan daerah telah membawa implikasi positif bagi kemajuan kota Palu. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka status kota Palu diubah menjadi kota administratif. Pada tahap perkembangan kota, penambahan penduduk pun terus mengalami peningkatan. Seiring dengan itu muncul berbagai persoalan terkait dengan sistem penataan kota. Pencemaran mulai tampak di beberapa sudut kota, serta keadaan tata bangunan penduduk yang masih semraut. Pada sisi lain rencana perluasan pasar Bambaru tidak memungkinkan lagi dilakukan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tahun 1979 pemerintah daerah tingkat II Donggala berinisiatif membuat pasar yang lebih luas.

Pembangunan pasar baru ditempatkan di lokasi hamparan luas yang terletak pada posisi silang Kelurahan Kamonji dan Kelurahan Balaroa, (*sekarang dikenal dengan Pasar Inpres Manonda*). Berdirinya pasar ini sesuai dengan program proyek Inpres, yaitu bantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar kepada daerah tingkat II Donggala dalam pelita III tahun Anggaran 1979/1980. Pengaturan dan pengelolaan pasar tersebut sesuai dengan surat keputusan (SK) Bupati kepala daerah tingkat II Donggala Nomor 2237/OP.530/II/1979 tentang pelimpahan tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten daerah tingkat II Donggala kepada pemerintah wilayah kota administrasi Palu, diserahkan dan menjadi pemerintah kota administratif kota Palu.

Sesudah peresmian Pasar Inpres Manonda masih sepi dari aktifitas jual beli. Masyarakat kebanyakan masih melakukan aktifitas jual beli di Pasar Tua Bambaru. Aktifitas di Pasar Inpres Manonda baru tampak mulai ramai pada tahun 1982. Ketika itu jumlah dan laju arus pendatang (imigrasi) mengalami peningkatan yang sangat pesat. Meningkatnya arus pendatang ke Kota Palu, khususnya pendatang dari wilayah Sulawesi Selatan (etnis Bugis) mulai membentuk kelompok atau pusat konsentrasi pemukiman di sekitar Pasar Inpres Manonda.

Pemikiran Etnosentrisme

Komunikasi berfungsi sebagai instrumen dalam berinteraksi dengan orang lain. Setiap peristiwa komunikasi (interpersonal) berlangsung pertukaran pesan secara timbal balik. Pesan yang disampaikan berisi isyarat bermakna yang dikemas dalam bentuk lambang-lambang bahasa (*verbal maupun non-verbal*). Sementara bahasa merupakan salah satu produk dan wujud ekspresi budaya. Makna dan bahasa sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mengungkap makna secara tepat dari suatu pesan, maka

dibutuhkan kemampuan memahami arti dari kode-kode bahasa yang digunakannya. Dengan perkataan lain, kemampuan memahami bahasa merupakan syarat memahami kandungan makna pesan yang diterima oleh setiap peserta komunikasi.

Kurangnya pengetahuan terhadap hal tersebut di atas berpotensi melahirkan kesalahan memaknai pesan karena ketidak-tahuan bahasa orang lain (verbal maupun non-verbal). Berdasarkan identifikasi di lapangan ditemukan bahwa ketegangan sosial antaretnis Kaili-Bugis sering dipicu oleh kasus individual dimana pelakunya memiliki latar belakang kehidupan sosial budaya yang berbeda. Seperti terungkap melalui kesaksian salah seorang pemuka etnis Kaili mengatakan bahwa *“beberapa kasus perselisihan melibatkan etnis Kaili yang berasal dari “gumung”. Mereka adalah suatu komunitas yang umumnya kurang cakap menggunakan bahasa Indonesia dan tidak mengerti bahasa Bugis. Kedatangan mereka ke pasar untuk menjual hasil pertanian seperti sayur, jagung, pisang dan lainnya.”*

Kesalahan interpretasi pesan akan memunculkan pandangan sosial yang keliru berupa *stereotype* dan *prejudice* yang keduanya lebih dikenal dengan istilah pandangan etnosentrisme. Suatu pandangan subyektif yang menilai budaya sendiri paling superior dan unggul dibanding budaya orang lain. Budaya sendiri ditempatkan sebagai pusat orientasi dan standar untuk mengukur budaya-budaya lain. Pada saat yang sama etnosentrisme melahirkan sinisme, sikap meremehkan dan apriori.

Sulit dipungkiri, munculnya beberapa peristiwa konflik antar etnis Kaili dan Bugis di Kota Palu pada masa lalu mengindikasikan bahwa pemikiran etnosentrisme masih menjadi sumber potensi konflik (laten) yang belum teratasi. Beberapa asumsi yang memperkuat argumentasi tersebut :

1. Ketika terjadi ketegangan antar individu yang berbeda etnis (Kaili-Bugis), seringkali mengalami eskalasi dengan melibatkan kelompok etnis. Itulah sebabnya beberapa konflik antaretnis selalu dimulai dari konflik yang bersifat individual.
2. Setiap konflik yang melibatkan kelompok etnis cenderung dipicu oleh masalah sepele yang pada umumnya tidak memiliki kaitan dengan “ke-etnis-an” tetapi didominasi oleh persoalan ekonomi seperti perselisihan dalam memperebutkan tempat penjualan di pasar.
3. “Etnisitas” masih menjadi isu sensitif yang dapat memicu rasa tidak nyaman dan seringkali mengemuka dalam ruang – ruang publik. Berbagai persoalan publik di Kota Palu tidak jarang dikaitkan dengan etnisitas seperti; ketimpangan ekonomi, kemiskinan, marginalisasi budaya lokal, dan isu politik aliran berbasis kesadaran etnis.

Persaingan Ekonomi

Ketika Pasar Inpres mengalami perubahan status dari “tradisional” menjadi “tradisional-modern” maka relokasi pun dilakukan. PKL diberi ruang yang terbatas hanya pada lapisan luar pasar, sementara lapisan dalam digunakan untuk penjualan produk pabrikan (los dan pertokoan). Relokasi PKL menimbulkan permasalahan baru karena jumlah mereka relatif

mengalami peningkatan, sementara luas areal yang disiapkan semakin terbatas. Akibatnya, perebutan tempat penjualan antar sesama PKL atau antara PKL dan pedagang LOS serta pedagang toko merupakan konsekuensi logis yang sulit dihindari.

Dikalangan PKL pun terjadi kompetisi terbuka pada setiap harinya. Terutama pada hari – hari pasar seperti hari rabu dan sabtu, dimana sering terjadi ketegangan antar PKL dalam memperebutkan tempat jualan yang dipandang strategis. Jaringan pedagang Bugis yang ‘menguasai’ pasar memberikan perlakuan agak berbeda terhadap para PKL berdasarkan hubungan kekerabatan, persahabatan atau kesamaan etnis. perbedaan perlakuan tersebut menciptakan klas-klas diantara para PKL.

Menurut ketentuan yang diatur oleh pihak pengelola pasar, pembagian tempat jualan harus dibatasi secara proporsional dan adil. Setiap penjual memperoleh satu tempat jualan dengan ukuran sekitar 2 x 3 meter. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, ada pedagang yang memiliki lebih dari satu tempat jualan, bahkan ada yang memiliki sampai 3 hingga 4 tempat. Kondisi pengaturan pasar yang tidak konsisten telah memancing munculnya kekisruhan di kalangan pedagang. Dari sinilah awal mula sering terjadi peristiwa yang menjadi pemicu ketegangan antaretnis.

Khusus PKL berlatar belakang etnis Bugis memperoleh perlakuan khusus, sehingga memiliki kemudahan akses penguasaan terhadap tempat-tempat penjualan di pasar. Jaringan persahabatan dan sesama etnis menyebabkan pedagang Bugis sering dituding sebagai pihak yang melanggar ketentuan batas pemilikan tempat jualan. Sementara itu, PKL yang berasal dari daerah pegunungan, membawa barang jualan berupa hasil-hasil bumi (pertanian) selalu kesulitan memperoleh tempat jualan. Sebelum tiba di pasar, semua tempat jualan nyaris telah dikuasai oleh pedagang lainnya. Mereka pun merasa diperlakukan secara tidak adil. Kondisi seperti itu telah membangkitkan kesadaran etnis, bahwa sebagai orang Kaili mereka pun memiliki hak yang sama dengan pedagang lainnya.

Pedagang Bugis yang telah ‘membeli’ tempat jualan merasa berhak mempertahankan miliknya, sedangkan pedagang Kaili tidak memperoleh tempat dan juga merasa berhak atas pemanfaatan sumber daya pasar telah memicu lahirnya ketegangan bahkan terjadi kekerasan fisik. Suatu peristiwa yang pada mulanya disebabkan oleh ketidak-teraturan sistem pengelolaan pasar kemudian membuka persaingan terbuka antarpedagang dengan dasar argumentasinya masing-masing. Pedagang Bugis menggunakan argumentasi rasional bahwa logika pasar, adalah logika persaingan bebas. Siapa yang kuat dia yang akan eksis. Sedangkan pedagang Kaili menekankan sisi kemanusiaan dan hak sebagai pribumi yang juga menilai pasar sebagai milik bersama yang harus digunakan secara adil, proporsional dan tanpa dominasi.

Model Perencanaan Komunikasi Antaretnis

Mengacu pada rangkaian masalah seperti yang telah dipaparkan di atas, maka dipandang perlu adanya suatu model pemecahan masalah melalui perencanaan komunikasi antaretnis. Komunikasi antaretnis dipilih sebagai perspektif tunggal dalam penelitian ini karena beberapa asumsi-asumsi mendasar seperti berikut :

1. Setiap ketegangan sosial yang memakai label etnis dengan melibatkan “perasaan” etnisitas dari pihak-pihak yang terlibat merupakan indikasi kuat bahwa peristiwa tersebut memiliki akar persoalan pada level hubungan komunikasi sosial yang tidak efektif. Komunikasi Dengan perkataan lain, ketidak-mampuan mengelola perbedaan identitas dan kesadaran etnisitas pada tingkat interaksi sosial menyebabkan munculnya ketegangan antaretnis, (*faktor laten*)
2. Setiap ketegangan sosial merupakan implikasi dari kegagalan membangun komunikasi. Berbagai kepentingan dan persaingan sosial yang tidak dikelola secara baik (*soft*), biasanya dipicu oleh faktor-faktor seperti; kesalahan memaknai pesan, kurangnya intensitas komunikasi yang menimbulkan kerengganan hubungan sosial atau ekspersi komunikasi yang cenderung represif, intimidatif atau merendahkan martabat pihak lain (*faktor manifest*).

Luasnya ruang lingkup peta permasalahan yang saling berkaitan serta keharusan membatasi penggunaan cara pandang, maka penelitian ini hanya berfokus pada tawaran solusi alternatif yang bersifat mono-perspektif, namun hendak berpretensi mendeskripsikan lingkungan persoalan secara komprehensif.

Untuk membangun komunikasi antaretnis diperlukan pendekatan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait diantaranya; unsur-unsur masyarakat yang mewakili masing-masing etnis, organisasi paguyuban seperti KKSS dan FPK, unsur pemerintah daerah (termasuk Camat Palu Barat, Lurah setempat, Perindakop dan Dinas Kebersihan) serta pihak pengemban (PT Sari Dewi). Keterlibatan berbagai pihak bukan hanya sekedar ingin menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan permasalahan hubungan antaretnis juga sekaligus sebagai peristiwa simbolik yang mengandung pesan kebersamaan dan soliditas sosial yang tinggi.

Semangat mewujudkan harmoni sosial yang dibangun melalui komunikasi antaretnis harus terus digalakkan. Berbagai cara dan pendekatan mungkin bisa dilakukan, namun prinsipnya harus bermuara pada penciptaan suasana komunikasi yang efektif. Para pihak yang terkait diharapkan tetap berada dalam satu visi dan komitmen untuk selalu berperan aktif dalam menjaga lingkungan sosial yang aman, damai, adil dan penuh kesadaran toleransi.

Kompleksnya masalah hubungan antaretnis Bugis – Kaili tentu memerlukan penanganan secara serius dan konsisten, maka peserta FGD memandang pentingnya sebuah wadah bersama yang secara spesifik mengatasi berbagai kemelut (laten maupun manifest) yang menjadi sumber kekisruhan antaretnis. Dibutuhkan kerja – kerja institusional dalam menyelesaikan persoalan sosial secara mendasar. Inisiatif tersebut realistis karena kedua etnis memiliki modal sosial (*social capital*) berupa kesadaran kolektif yang tinggi tentang nilai kegotong-royongan maupun nilai kekeluargaan

Mengacu pada model komunikasi antaretnis, Milton menawarkan solusi dengan menekankan pada perlunya dibentuknya wadah bersama lintas etnis yang diformulasikan ke dalam bentuk forum komunikasi antaretnis. Wadah tersebut selain berfungsi sebagai instrumen bersama dalam upaya responsif menyelesaikan suatu konflik pada level praktis

agar tidak mengalami eskalasi, juga dapat menjadi sarana (ruang dialog) kebudayaan bagi para elit masyarakat dalam membangun diskursus publik tentang tema – tema sosial. Lebih dari itu, forum komunikasi tersebut sekaligus menjadi lokomotif bagi gerakan sosialisasi publik tentang kesadaran multi-kulturalisme. Keberadaan forum komunikasi sangat dibutuhkan dalam mengawal gerakan sosialisasi kesadaran sebagai gerakan kultural yang berlangsung secara terus-menerus hingga waktu yang tidak ditentukan.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Alo Liliweri yang menawarkan sebuah model komunikasi antaretnis melalui tiga tahapan substansial yaitu ; konsolidasi, integrasi dan implementasi. Tahapan konsolidasi menuntut kesamaan pandangan dan orientasi sosial. Segalanya dimulai dari penyatuan pemikiran dan sumber daya sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan bersama. Bagi Liliweri, tanpa konsolidasi masyarakat mustahil persoalan sosial dapat teratasi dengan baik.

Tahapan kedua yaitu integrasi, merupakan konsekuensi lanjutan dari tahapan konsolidasi. Jika *konsolidasi* diletakkan pada tataran pemikiran dan visi bersama, maka *Integrasi* dimaknai sebagai upaya kongkrit dalam menyatukan sumber daya sosial yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk aksi sosial (dukungan dana, tenaga, fasilitas) yang mendorong pencapaian tujuan bersama. *Adapun tahapan ketiga*, yaitu tahapan implementasi, berkaitan dengan penerapan program yang telah dicanangkan sebelumnya. Ketiga tahapan tersebut di atas secara tersirat membutuhkan organisasi sebagai sarana pendukung utama dalam mewujudkan agenda komunikasi antaretnis.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebelum kebijakan relokasi, Pasar Inpres Manonda lebih didominasi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana tidak tampak kesenjangan mencolok antar pedagang. Meskipun terdapat persaingan, namun susana hubungan sosial antar pedagang relatif aman, damai dan harmonis. Suasana tersebut berlangsung sejak pembangunan Pasar Inpres Manonda pada tahun 1979/1980 hingga tahun 1996.

Pada tahun 1996 lahir kebijakan relokasi Pasar Inpres Manonda Palu yang membuka peluang masuknya modal berskala “menengah” yang menandai perubahan sistem pengaturan dan tata kelola pasar. Bagi pedagang “menengah” yang menjual produk pabrikan diberi ruang pada lingkaran dalam pasar. Sedangkan Pedagang Kaki Lima (PKL) diberi ruang terbatas pada bagian/ lapisan luar pasar. Sistem pengaturan semacam itu telah memicu lahirnya “kompetisi terbuka” antar pedagang yang melibatkan baik antar sesama PKL, maupun antara PKL dengan pedagang “menengah”. Suasana kompetisi pun semakin sengit, dimana tercipta kesenjangan yang nyata antar pedagang. Dari sinilah awal mula cerita tentang konflik sosial.

Etnosentrisme sebagai cara berpikir dan sikap eksklusivisme etnis masih mewarnai hubungan antaretnis Bugis – Kaili yang tampak pada beberapa aspek hubungan seperti; konsentrasi pemukiman, konsentrasi etnik tertentu pada suatu jenis pekerjaan, menguatnya

ikatan konsolidasi kekerabatan, perbedaan bahasa, persaingan ekonomi dan mobilisasi dalam kegiatan pemilukada. Eksklusivisme etnis tetap menjadi potensi laten yang sewaktu-waktu merusak hubungan antar kedua etnis tersebut.

Untuk mencegah menguatnya eksklusivisme etnis, dibutuhkan proses penyadaran pada level masyarakat luas tentang pandangan multikulturalisme. Komunikasi antaretnis harus dikembangkan secara efektif dan berkesinambungan melalui program sosialisasi. Agar program sosialisasi dapat diwujudkan diperlukan pula kerja profesional melalui pembentukan wadah komunikasi bersama antaretnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, (2010) Pola Komunikasi Antaretnis Kaili dan Etnis Bugis di Pasar Inpres Manonda Palu (Suatu Kajian Komunikasi Antar Budaya), Fisip Untad
- Bungin Burhan (2003). Teknik-Teknik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial. Di dalam : Bungin B. (ed). 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm: 83-105
- Kim, Young, Y. (1992) Communicating With Strangers an Approach to Intercultural Communication. McGraw-Hill, Inc
- Konertjaningrat, (2005) Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Jakarta: Djambatan
- Liliweri, Alo. (1994). Prasangka Sosial dan Komunikasi Antaretnik. PT Pustaka LP3ES Indonesia
- Liliweri, Alo. (200) Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____,(2007) Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mamar, Sulaeman, dkk 2008 Potensi Kearifan Budaya Lokal yang Mendukung Kehidupan Damai Masyarakat di Kota Palu; Penelitian Fundamental; dibiayai Dikti Depdikbud; Palu: Lembaga Penelitian Untad.
- _____, (2009) Budaya Berpikir Positif Suku Bangsa Sebagai Modal Integrasi Bangsa dan Harmonisasi Sosial di Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah. Penelitian Strategis Nasional, dibiayai Dikti Depdikbud, Palu: Lembaga Penelitian Untad
- Mulyana, Dedy. (2000) Komunikasi Antarbudaya. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Yusuf, Yusmar (1994) Relasi Baba-Tauke dan Awang-Melayu. PT Pstaka LP3ES Indonesia